



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara  
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman [www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id)

**NOMOR 21 TAHUN 2025**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

**SERI F NOMOR 1066**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 21 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
  - b. bahwa Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Dalam Negeri guna mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50860);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
10. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Nomor 46 tahun 2024 Seri F Nomor 989).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Samosir.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Samosir.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
8. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

9. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
10. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.
11. Akses arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
12. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan Arsip Dinamis yang dihasilkan dan pengelompokannya.
13. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
14. Kategori Pembatasan Akses Terhadap Arsip adalah kewenangan pengguna arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.
15. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
16. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
17. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.
18. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
19. Terbatas adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
20. Biasa/Terbuka adalah Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
21. Tingkat klasifikasi keamanan akses arsip dinamis adalah pengelompokan arsip dalam tingkatan tertentu berdasarkan dampak yang ditimbulkan apabila informasi yang terdapat di dalamnya diketahui oleh pihak yang tidak berhak.

22. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam rangka melindungi fisik dan informasi arsip dari penyalahgunaan dan kepentingan yang tidak sah.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menyediakan informasi arsip yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses bagi kepentingan publik serta menjamin keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis meliputi:

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dan
- (2) Pengaturan akses arsip.

### **BAB II**

#### **SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS**

#### Pasal 5

- (1) Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan angka dan huruf.
- (2) Asas gabungan sebagai mana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan pengolahan arsip dinamis.

#### Pasal 6

- (1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Arsip yang tercipta pada instansi pencipta dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
  - b. Keempat tingkat klasifikasi sebagaimana tersebut pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
  - c. Keempat tingkat klasifikasi sebagaimana tersebut pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya; dan
  - d. Publik dapat mengakses informasi yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

(2) Sistem Klasifikasi...../

- (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yakni fungsi fasilitatif dan fungsi substantif.
- (3) Adapun fungsi fasilitatif meliputi urusan:
- a. ketatausahaan dan kerumahtanggaan
  - b. perlengkapan
  - c. pengadaan
  - d. perpustakaan
  - e. kearsipan
  - f. persandian
  - g. perencanaan pembangunan
  - h. organisasi dan tatalaksana
  - i. penelitian, pengkajian dan pengembangan
  - j. hukum
  - k. hubungan masyarakat
  - l. pengawasan internal
  - m. sumber daya manusia
  - n. pendidikan dan pelatihan
  - o. keuangan daerah
- (4) Adapun fungsi substantif meliputi urusan:
- a. otonomi daerah
  - b. pemerintahan umum
  - c. kesatuan bangsa dan politik
  - d. pemilu
  - e. satuan polisi pamong praja
  - f. penanggulangan bencana, pencarian, pertolongan
  - g. pembangunan daerah tertinggal
  - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  - i. pendidikan
  - j. keolahragaan
  - k. kepemudaan
  - l. kebudayaan
  - m. kesehatan
  - n. agama dan kepercayaan
  - o. sosial
  - p. pemberdayaan masyarakat desa
  - q. pertamanan dan pemakaman
  - r. kependudukan dan catatan sipil
  - s. keluarga berencana
  - t. ketahanan pangan
  - u. perdagangan
  - v. koperasi dan UMKM
  - w. kehutanan
  - x. kelautan dan perikanan
  - y. pertanian
  - z. peternakan
  - aa. perkebunan
  - bb. perindustrian
  - cc. energi dan sumber daya mineral
  - dd. perhubungan
  - ee. komunikasi dan informatika
  - ff. pariwisata dan ekonomi kreatif
  - gg. statistik
  - hh. ketenagakerjaan
  - ii. penanaman modal
  - jj. pertanahan

- kk. transmigrasi
- ll. pekerjaan umum
- mm. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- nn. tata ruang, tata kota)
- oo. lingkungan hidup

### **BAB III**

#### **PENGATURAN AKSES ARSIP**

##### **Pasal 7**

- (1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digunakan kepada pengguna arsip yang berhak.
- (2) Pengguna arsip yang berhak mengakses arsip terdiri dari:
  - a. Pengguna internal yang ada di instansi;
  - b. Pengguna eksternal di luar instansi;
  - c. Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Samosir.

##### **Pasal 8**

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. Penentu Kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Pimpinan tingkat tertinggi, yaitu kepala perangkat daerah/instansi yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya.
    2. Pimpinan tingkat tinggi, yaitu Sekretaris, Kepala Bidang yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip dibawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi dan yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin; dan
    3. Pimpinan tingkat menengah, yaitu Kepala Sub Bidang, atau Sub Koordinator yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip dibawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, dan yang satu tingkat di luar unit kerjanya kecuali sudah mendapatkan izin.
  - b. Pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas arsip, arsiparis dan pegawai, yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi sangat rahasia, rahasia, terbatas, yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan tingkat menengah dan satu tingkat diatas unit kerjanya kecuali telah mendapat izin dari pejabat yang mempunyai kewenangan.

- (2) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/terbuka;
  - b. Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pemangunan; dan
  - c. Aparat Penegak Hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara/proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

**BAB IV  
UNIT PENGOLAH**

Pasal 10

Unit Pengolah sebagai unit kerja yang menciptakan arsip bertanggung jawab terhadap layanan penggunaan, penjagaan keselamatan dan keamanan fisik dan informasi arsip yang dikategorikan sangat rahasia, rahasia, terbatas dan biasa/terbuka.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 23 Mei 2025

**BUPATI SAMOSIR,**

Cap/dto

**VANDIKO T GULTOM**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir  
Nomor 21 Tahun 2025  
Seri F Nomor 1066  
Tanggal 23 Mei 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

  
MARUDUT TUA SITINJAK

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR****NOMOR : 21 TAHUN 2025****TANGGAL : 23 MEI 2025****TENTANG : PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI  
KEAMANAN AKSES ARSIP DINAMIS  
KABUPATEN SAMOSIR**

NO	KLASIFIKASI			JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2			3	4	5	6	7
1	000			UMUM				
	000.1			KETATAUSAHAAN DAN KERUMAH TANGGAAN				
		000.1.1		Telekomunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.1.2		Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
			000.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.1.2.2	Perjalanan Dinas DPRD	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.1.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.1.3		Perjalanan Dinas Luar Negeri				
			000.1.3.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			000.1.3.2	Perjalanan Dinas DPRD	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.1.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.1.4		Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.1.5		Rapat pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.1.6		Penyediaan Konsumsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.1.7		Pengurusan Kendaraan Dinas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.1.7.1	Pengurusan surat-surat kendaraan dinas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.1.7.2	Pemeliharaan dan perbaikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.1.7.3	Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.1.8		Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			000.1.8.1	Pertamanan/ Landscape	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.1.8.2	Penghijauan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.1.8.3	Perbaikan Gedung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.1.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.1.8.5	Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.1.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.1.9		Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.1.9.1	Perbaikan / Pemeliharaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.1.9.2	Pemasangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.1.10		Ketertiban dan Keamanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.1.10.1	Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			000.1.10.2	Laporan Ketertiban dan Keamanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.1.11		Administrasi Pengelolaan Parkir	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.1.12		Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	000.2			PERLENGKAPAN				
		000.2.1		Inventarisasi dan Penyimpanan				
			000.2.1.1	Data hasil inventarisasi dan penyimpanan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			000.2.1.2	Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.2.2		Pemeliharaan peralatan kantor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.2.2.1	Data hasil pemeliharaan kantor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.2.2.2	Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.2.3		Distribusi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			000.2.3.1	Barang habis pakai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.2.3.2	Barang milik daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.2.4		Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		000.2.5		Pengelolaan Database Barang Milik Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
	000.3			PENGADAAN				
		000.3.1		Rencana pengadaan Barang dan jasa (antara lain Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait

		000.3.2		Pengadaan Langsung (antara lain persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
		000.3.3		Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
		000.3.4		Swakelola (antara lain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
		000.3.5		Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain <i>Data base</i> pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, <i>Data base</i> kontrak, <i>Data base</i> Pengadaan Barang/jasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		000.3.6		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	000.4			PERPUSTAKAAN				
		000.4.1		Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.4.2		Deposit Bahan Pustaka				
			000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.4.2.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.4.3		Koleksi Pustaka	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.4.3.1	Pembelian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.4.3.2	Hibah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			000.4.3.3	Hadiah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.4.3.4	Tukar Menukar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.4.3.5	Implementasi Undang-Undang KCKR	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			000.4.3.6	Terbitan Internal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.4.3.7	Pendistribusian bahan pustaka surplus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.4.3.8	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.4.4		Pengolahan Bahan Pustaka	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.4.5		Pangkalan Data Katalog Koleksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.4.6		Layanan Perpustakaan				Unit Kerja Terkait
			000.4.6.1	Keanggotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			000.4.6.2	Peminjaman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.4.6.3	Pengembangan gemar baca	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.4.7		Kerjasama Perpustakaan				
			000.4.7.1	MoU	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			000.4.7.2	Perjanjian kerjasama	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			000.4.7.3	Pengembangan gemar baca	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.4.8		Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.4.8.1	Pengembangan situs web	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.4.8.2	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			000.4.8.3	Pengembangan program aplikasi perpustakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.4.8.4	Pengembangan pangkalan data perpustakaan digital	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.4.9		Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.4.10		Konservasi				
			000.4.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.4.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.4.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.4.11		Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.4.12		Transformasi Digital	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.4.13		Kurasi Digital	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.4.14		Pengembangan Perpustakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.4.14.1	Perpustakaan Umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			000.4.14.2	Perpustakaan Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.4.14.3	Perpustakaan Sekolah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.4.14.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	000.5			KEARSIPAN				
		000.5.1		Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.5.2		Pembinaan Kearsipan				
			000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.5.2.3	Penilaian Arsiparis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.5.2.5	Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.5.2.8	<i>Data base</i> Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, antara lain Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.5.2.11	Jadwa Retensi Arsip, antara lain Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.5.3		Pengelolaan Arsip Dinamis				
			000.5.3.1	Penciptaan (antara lain Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			000.5.3.2	Fasilitasi Kearsipan, antara lain Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif antara lain daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.5.3.4	Penggunaan (antara lain daftar arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas arsip dinamis)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.5.4		Program Arsip Vital (antara lain Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.5.5		Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.5.6		Penyusutan Arsip				

			000.5.6.1	Pemindahan Arsip (antara lain Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.5.6.2	Pemusnahan Arsip (antara lain SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip Yang dimusnahkan.	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.5.6.3	Penyerahan Arsip Statis (antara lain Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.5.7		Alih Media Arsip (antara lain Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		000.5.8		Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis				
			000.5.8.1	Data Base Pengelolaan Arsip Akti	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.5.8.2	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.5.9		Pengelolaan Arsip Statis				
			000.5.9.1	Akuisisi (antara lain Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang diserahkan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.5.9.3	Sejarah Lisan (antara lain Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaser/CD/media lain sesuai perkembangan TI dan Transkrip)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.5.9.6	Preservasi Preventif (antara lain penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.5.9.7	Preservasi Kuratif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis (antara lain pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.5.9.9	Akses Arsip Statis (antara lain Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.5.10		Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.5.11		Pengelolaan SIKN dan JIKN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.5.12		Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.5.13		Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		000.5.14		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.5.15		Pengawasan Kearsipan				
			000.5.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.5.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.5.15.3	Sanksi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
	000.6			PERSANDIAAN				
		000.6.1		Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		000.6.2		Pengamanan persandian				
			000.6.2.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptografi	Sangat Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara.	Unit Kerja Terkait

			000.6.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			000.6.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		000.6.3		Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi				
			000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			000.6.3.2	Administrasi Pengkajian	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait

			000.6.3.3	Pelaksanaan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			000.6.3.4	Pelaporan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
		000.6.4		Pembinaan dan Pengendalian Persandian				
			000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.6.4.2	Jaring Komunikasi	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
		000.6.5		Layanan Sertifikasi Elektronik				
			000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.6.5.7	Pelaporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	000.7			PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
		000.7.1		Musyawaharah Perencanaan Pembangunan/ Musrenbang				
			000.7.1.1	Musrenbang Provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.7.1.2	Musrenbang Nasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.7.1.3	Musrenbang Kab/Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.7.1.6	Musrenbang Desa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.7.2		Perencanaan Pembangunan Daerah				
			000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.7.2.6	Program kerja tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.7.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.7.2.8	Laporan Berkala	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			000.7.2.9	Laporan Insidental	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.7.2.10	Evaluasi Program	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.7.3		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.7.4		Konsultasi Perencanaan Pembangunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.7.5		Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.7.6		Aksi Strategis Daerah				
			000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.7.6.3	Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.7.6.5	Penerapan perencanaan aksi strategi daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.7.7		Perencanaan Pendanaan Pembangunan				

			000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			000.7.7.2	Pendanaan Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
	000.8			ORGANISASI DAN TATA LAKSANA				
		000.8.1		Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				
			000.8.1.1	Pembentukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.8.1.2	Pengubahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.8.1.3	Pembubaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.8.2		Uraian Jabatan		Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	
			000.8.2.1	Analisa Jabatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.8.2.2	Analisa Beban Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.8.3		Ketatalaksanaan				
			000.8.3.1	Proses Bisnis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			000.8.3.2	Standar Pelayanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.8.3.3	Standar Operasional Prosedur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.8.3.4	Pelayanan Publik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.8.4		Standar Kompetensi jabatan structural dan fungsional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.8.5		Evaluasi Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.8.6		Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi				
			000.8.6.1	Budaya Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.8.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.8.6.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	000.9			PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN				
		000.9.1		Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		000.9.2		Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi: rencana kerja, administrasi penelitian, pelaksanaan, hasil penelitian / pengkajian / rekomendasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.9.3		Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, hasil pengkajian dan pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.9.4		Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.9.5		Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.9.6		Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi				
			000.9.6.1	Data	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.9.6.2	Statistik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.9.6.3	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.9.7		Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.9.8		Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		000.9.9		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		000.9.10		Seminar, lokakarya, temukarya, workshop	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
2	100			PEMERINTAHAN				
	100.1			OTONOMI DAERAH				
		100.1.1		Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		100.1.2		Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		100.1.3		Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		100.1.4		Pemilihan Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)				
			100.1.4.1	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			100.1.4.2	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			100.1.4.3	Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			100.1.4.4	Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			100.1.4.5	Assosiasi Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		100.1.5		Otonomi khusus dan daerah istimewa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		100.1.6		Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)				

			100.1.6.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			100.1.6.2	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			100.1.6.3	Pengembangan Kapasitas Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		100.1.7		LKPJ/LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
	100.2			PEMERINTAHAN UMUM				
		100.2.1		Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		100.2.2		Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		100.2.3		Wilayah Administrasi dan Perbatasan				
			100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	100.3			HUKUM				
		100.3.1		Program Legislasi				
			100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			100.3.1.2	Program Legislasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		100.3.2		Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		100.3.3		Program Legislasi				
			100.3.3.1	Keputusan/Ketetapan Gubernur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			100.3.3.2	Keputusan/Ketetapan Bupati	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			100.3.3.3	Keputusan/Ketetapan Walikota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			100.3.3.4	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			100.3.3.6	Keputusan Sekretaris Daerah Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		100.3.4		Program Legislasi				
			100.3.4.1	Instruksi/Surat Edaran Provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			100.3.4.2	Instruksi/Surat Edaran Kabupaten	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			100.3.4.3	Instruksi/Surat Edaran Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			100.3.4.4	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		100.3.5		Surat Perintah				
			100.3.5.1	Surat Perintah Gubernur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			100.3.5.2	Surat Perintah Bupati	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			100.3.5.3	Surat Perintah Walikota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		100.3.6		Standar / Pedoman / Prosedur Kerja / Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		100.3.7		Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MOU)/ Kontrak/ Perjanjian kerja sama				
			100.3.7.1	Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			100.3.7.2	Luar Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		100.3.8		Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		100.3.9		Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pembinaan Hukum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		100.3.10		Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi Pemberian bantuan/konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		100.3.11		Kasus/ Sengketa Hukum				
			100.3.11.1	Pidana Kasus/sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			100.3.11.3	Tata Usaha Negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			100.3.11.4	Perburuhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			100.3.11.5	Arbitrase	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			100.3.11.6	Sengketa Adat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		100.3.12		Perijinan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		100.3.13		Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)				
			100.3.13.1	Hak Cipta	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			100.3.13.2	Hak Paten	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			100.3.13.3	Hak Desain Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			100.3.13.5	Hak Merk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		100.3.14		Permohonan HAKI yang ditolak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
3	200			POLITIK				
	200.1			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
		200.1.1		Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		200.1.2		Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan				
			200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.1.2.3	Bela Negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		200.1.3		Kewaspadaan Nasional				
			200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait

			200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
		200.1.4		Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan				
			200.1.4.1	Ketahanan Seni	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.1.4.2	Ketahanan Budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			200.1.4.6	Fasilitasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas: Sanksi Administrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.1.4.11	Fasilitasi Ormas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		200.1.5		Politik Dalam Negeri				
			200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.1.5.3	Pemerintahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.1.5.4	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.1.5.5	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			200.1.5.6	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.1.5.7	Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.1.5.8	Database Parpol	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.1.5.9	Pendidikan Budaya Politik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		200.1.6		Ketahanan Ekonomi				
			200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait

			200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
	200.2			PEMILU				
		200.2.1		Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		200.2.2		Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih				
			200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		200.2.3		Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu				
			200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		200.2.4		Penetapan Peserta Pemilu				
			200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		200.2.5		Pencalonan Pemilu				
			200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.2.5.3	Daftar bakal calon	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		200.2.6		Kampanye Pemilu				
			200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		200.2.7		Dana Kampanye				
			200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			200.2.7.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		200.2.8		Pemungutan dan Penghitungan Suara				
			200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.2.8.2	Master surat suara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.2.8.3	Surat suara yang terpakai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.2.8.4	Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.2.8.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		200.2.9		Penetapan Hasil Pemilu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		200.2.10		Perselisihan Hasil Pemilu				
			200.2.10.1	Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.2.10.2	Jawaban dan kesimpulan termohon	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			200.2.10.3	Salinan Putusan lembaga peradilan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		200.2.11		Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
4	300			KEAMANAN DAN KETERTIBAN				
	300.1			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
		300.1.1		Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		300.1.2		Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja				
			300.1.2.1	Tata Operasiona Polisi Pamong Praja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.1.2.2	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		300.1.3		Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		300.1.4		Perlindungan Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		300.1.5		Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

		300.1. 6		Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	300.2			PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN				
		300.2.1		Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		300.2.2		Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan				
			300.2.2.1	Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			300.2.2.2	Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			300.2.2.3	Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			300.2.2.4	Pemasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			300.2.2.5	Perencanaan dan standarisasi, penyelenggaraan operasi SAR, siaga dan latihan, tempat latihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			300.2.2.6	Registrasi BEACON	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		300.2.3		Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		300.2.4		Potensi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		300.2.5		Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan				
			300.2.5.1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.2.5.2	Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			300.2.5.3	Pemasarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.2.5.4	Pemasarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			300.2.5.5	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		300.2.6		Operasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		300.2.7		Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		300.2.8		Operasi Komunikasi				
			300.2.8.1	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			300.2.8.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			300.2.8.3	Registrasi BEACON	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		300.2.9		Inventarisasi dan Pemeliharaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		300.2.10		Pengembangan Sistem Informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		300.2.11		Penyajian dan Layanan Informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		300.2.12		Pelaporan dan Evaluasi				
			300.2.12.1	Laporan Harian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.2.12.2	Laporan Bulanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			300.2.12.3	Laporoan Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			200.2.12.4	Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
5	400			KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	400.1			PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL				
		400.1.1		Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.1.2		Pembangunan Sumber Daya				

			400.1.2.1	Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.2.2	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.2.3	Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.2.4	Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.2.5	Fasilitasi Teknologi dan inovasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.2.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.2.7	Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.1.3		Peningkatan Infrastruktur				
			400.1.3.1	Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.3.2	Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.3.3	Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.1.3.5	Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.3.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.3.7	Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.1.4		Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha				
			400.1.4.1	Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.4.2	Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.4.3	Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.4.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.1.5		Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya				
			400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.1.5.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.5.5	Ketenagakerjaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.5.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.5.7	Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.1.6		Pengembangan Daerah Khusus				
			400.1.6.1	Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.6.2	Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.6.3	Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.6.4	Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.6.5	Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.6.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.1.6.7	Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

	400.2			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
		400.2.1		Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.2.2		Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.2.2.1	Data gender	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.2.2.2	Advokasi dan fasilitasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.2.3		Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)				
			400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.2.3.2	Data perlindungan perempuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.2.3.3	Advokasi dan fasilitasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.2.3.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.2.3.5	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.2.3.6	Analisis dan penyajian informasi gender	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.2.3.7	Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.2.4		Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)				
			400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			400.2.4.2	Data perlindungan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.2.4.3	Advokasi dan fasilitasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.2.4.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.2.4.5	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		400.2.5		Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)				
			400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.2.5.3	Data tumbuh kembang anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.2.5.4	Advokasi dan fasilitasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.2.5.5	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.2.5.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.2.6		Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.2.7		Penghargaan Kabupaten Layak Anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.2.8		Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	400.3			PENDIDIKAN				

		400.3.1		Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.3.2		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal				
			400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.2.2	Pelatihan Sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.2.3	Peringatan Hari anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.2.4	Block Grant	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.3.3		Pendidikan Masyarakat				
			400.3.3.1	Penyelenggaraan Program	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.3.3	Pembinaan Program	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.3.5	Pameran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.3.3.6	Rakor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.3.7	Sosialisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.3.4		Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.3.5		Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama				
			400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.5.2	Block Grant	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.3.6		Pendidikan khusus/Layanan Khusus				

			400.3.6.1	Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.6.2	Block Grant	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.6.3	Lomba, festival	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.6.5	Pendataan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.6.6	Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.3.7		Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik				
			400.3.7.1	Pendataan dan Pemeetaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.7.3	Sertifikasi Guru	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.7.7	Block Grant	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.3.8		Sekolah Menengah Atas				
			400.3.8.1	Kurikulum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.8.2	Bahan Ajar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.8.3	Pelatihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.8.4	Block grant	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.8.6	Lomba, Sayembara, festival	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.8.8	Bantuan siswa miskin	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		400.3.9		Pendidikan Khusus-Layanan Khusus				
			400.3.9.1	Bahan ajar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.9.2	Petunjuk Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.9.3	Block grant	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.9.8	Pendataan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.3.10		Pendidik dan Tenaga Pendidik				
			400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.10.3	Setifikasi Guru	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.10.7	Block grant	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.3.11		Penilaian Pendidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.3.12		Data dan Statistik Pendidikan				
			400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.3.13		Prasarana dan Sarana Pendidikan		Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	

			400.3.13.1	Prasarana Pendidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.13.2	Sarana Pendidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	400.4			KEOLAHRAGAAN				
		400.4.1		Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.4.2		Pengelolaan Olahraga Pendidikan				
			400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.4.3		Pengelolaan Olahraga Rekreasi				
			400.4.3.1	Olahraga Massal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.4.3.2	Olahraga Tradisional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.4.3.3	Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		400.4.4		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga				
			400.4.4.1	Olahraga Pendidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.4.4.2	Olahraga Rekreasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.4.4.3	Olahraga Prestasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.4.4.4	Sekolah Khusus Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.4.5		Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus				
			400.4.5.1	Olahraga Tradisional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.4.5.2	Layanan Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.4.6		Kemitraan dan Penghargaan Olahraga				
			400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.4.6.2	Penghargaan Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.4.7		Pembibitan dan IPTEK Olahraga				
			400.4.7.1	Pembibitan Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.4.7.2	Kompetisi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.4.7.3	IPTEK Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.4.8		Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan				
			400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.4.9		Industri dan Promosi Olahraga				
			400.4.9.1	Industri Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.4.9.2	Promosi Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.4.10		Olahraga Prestasi				
			400.4.10.1	Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.4.10.2	Nasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.4.10.3	Internasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.4.11		Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga				

			400.4.11.1	Standardisasi Keolahragaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.4.11.2	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.4.11.3	Infrastruktur Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	400.5			KEPEMUDAAN				
		400.5.1		Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.5.2		Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda				
			400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.5.2.3	Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.5.3		Peningkatan Wawasan Pemuda				
			400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.5.3.2	Wawasan Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.5.3.3	Wawasan Sosial dan Hukum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		400.5.4		Peningkatan Kapasitas Pemuda				
			400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Taqwa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.5.4.2	Kapasitas IPTEK	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.5.4.3	Pemanfaatan IPTEK	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.5.5		Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)				
			400.5.5.1	Pengkajian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.5.5.2	Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.5.5.3	Pendayagunaan (fasilitasi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.5.6		Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda				
			400.5.6.1	Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.5.7		Kewirausahaan				

			400.5.7.1	Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.5.7.2	Pengaderan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.5.7.3	Perintisan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.5.8		Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan				
			400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumberdaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.5.8.2	Pemberdayaan Organisasi Mahasiswa: Kelembagaan dan Sumberdaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumberdaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.5.9		Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda				
			400.5.9.1	Standardisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.5.10		Kemitraan dan Penghargaan Pemuda				

			400.5.10.1	Kemitraan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.5.10.2	Penghargaan Pemuda	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	400.6			KEBUDAYAAN				
		400.6.1		Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
		400.6.2		Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman				
			400.6.2.1	Registrasi Nasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.6.2.2	Pelindungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.6.2.3	Pengembangan dan Pemanfaatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.6.2.4	Eksplorasi dan Dokumentasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.6.3		Pembinaan Kesenian dan Perfilman				
			400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.6.4		Sejarah dan Nilai Budaya				
			400.6.4.1	Sejarah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.6.4.2	Pemetaan nilai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.6.4.5	Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.6.4.6	Publikasi sejarah dan nilai sejarah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.6.5		Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya				
			400.6.5.1	Internalisasi nilai budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.6.5.2	Kekayaan budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.6.5.3	Warisan budaya nasional dan dunia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.6.5.4	Diplomasi budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	400.7			KESEHATAN				
		400.7.1		Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.7.2		Upaya Kesehatan Dasar				
			400.7.2.1	Pelayanan kedokteran keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.2.2	Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.2.3	Pelaksanaan kesehatan primer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.2.6	ICD 10, Destistry & Stomatology	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.7.2.7	Infeksi menular lewat transfusi darah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.2.9	Pembiayaan darah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.2.10	Penggunaan darah rasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.2.11	Unit transfuse darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.2.12	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.2.13	Akreditasi puskesmas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.2.14	Puskesmas berprestasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.7.3		Upaya Kesehatan Rujukan				
			400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		400.7.4		Keperawatan dan keteknisian medik				
			400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.7.5		Penunjang medik dan sarana kesehatan				
			400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.5.2	Patologi dan toksilologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.5.3	Radiologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.7.6		Kesehatan Jiwa				
			400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.7.7		Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra				
			400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.7.2	Imunisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.7.4	Kesehatan matra	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.7.8		Pengendalian penyakit menular langsung				
			400.7.8.1	Pengendalian tuberkolosis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.7.9		Pengendalian penyakit bersumber binatang				
			400.7.9.1	Pengendalian malaria	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.9.3	Pengendalian zoonosis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.7.10		Pengendalian penyakit tidak menular				
			400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.10.3	Penyakit kanker	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.7.11		Penyehatan lingkungan				
			400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.11.4	Higien sanitasi pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.7.12		Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.7.13		Gizi				
			400.7.13.1	Gizi makro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.13.2	Gizi mikro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.13.5	Kewaspadaan gizi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.7.14		Kesehatan ibu				
			400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.7.14.4	Keluarga berencana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.7.15		Kesehatan anak				
			400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.7.16		Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer				
			400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.7.17		Kesehatan Kerja dan Olahraga				
			400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.17.2	Kapasitas kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.17.3	Lingkungan kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.17.5	Kesehatan perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.17.6	Kesehatan olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.7.18		Obat publik dan perbekalan kesehatan				
			400.7.18.1	Harga obat publik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.18.2	Pengadaan obat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			400.7.18.3	Perbekalan kesehatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		400.7.19		Produksi dan distribusi alat kesehatan				
			400.7.19.1	Alat kesehatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		400.7.20		Kefarmasian				

			400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			400.7.20.2	Farmasi klinis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			400.7.20.3	Farmasi Komunitas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			400.7.20.4	Penggunaan obat rasional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

		400.7.21		Produksi dan distribusi kefarmasian				
			400.7.21.1	Obat tradisional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			400.7.21.2	Kosmetik dan makanan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		400.7.22		Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan				

			400.7.22.1	Surat keterangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.7.23		Penanggulangan Krisis Kesehatan				
			400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.23.3	Pemantauan dan informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.7.24		Pengembangan dan Jaminan Kesehatan				
			400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.7.25		Intelegensia Kesehatan				
			400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.7.26		Kesehatan Haji				
			400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.7.27		Promosi Kesehatan				
			400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.27.4	Hari Kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.7.28		Data dan Informasi				
			400.7.28.1	Statistik kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		400.7.29		Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen				
			400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			400.7.29.4	Obat Asli Indonesia	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		400.7.30		Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya				
			400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan	Terbatas			Unit Kerja Terkait

			400.7.30.2	Standardisasi produk pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.30.4	Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan Berbahaya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		400.7.31		Rekam Medis	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
	400.8			AGAMA DAN KEPERCAYAAN				
		400.8.1		Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.8.2		Fasilitasi				
			400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.8.2.4	Kasus Keagamaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.8.3		Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME				
			400.8.3.1	Kelembagaan dan kepercayaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.8.3.4	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	400.9			SOSIAL				
		400.9.1		Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.9.2		Kesejahteraan Sosial Anak				

			400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			400.9.2.4	Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.9.2.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
		400.9.3		Rehabilitasi Sosial				
			400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.9.4		Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial				
			400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.9.4.2	Tuna susila dan korban <i>trafficking</i> perempuan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait

		400.9.5		Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
		400.9.6		Pelayanan sosial lanjut usia				
			400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.9.7		Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.9.8		Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
		400.9.9		Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial				
			400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.9.10		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam				
			400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.9.10.4	Kerjasama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.9.11		Jaminan Sosial				
			400.9.11.1	Seleksi dan verifikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.9.11.4	Kerjasama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.9.12		Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial				
			400.9.12.1	Ketahanan keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.9.13		Pemberdayaan komunitas adat terpencil				
			400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.9.14		Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan				
			400.9.14.1	Identifikasi dan analisis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.9.14.2	Pengembangan kapasitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.9.14.4	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.9.14.5	Bantuan Langsung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.9.15		Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial				
			400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.9.15.3	Pengembangan kesetiakawanan sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.9.15.4	Pengelolaan taman makam pahlawan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	400.10			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
		400.10.1		Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
		400.10.2		Pemerintahan Desa dan Kelurahan				
			400.10.2.1	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.10.2.3	Fasilitasi Permusyawaratan Desa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.10.2.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait

			400.10.2.5	Pengembangan Kapasitas Desa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.10.3		Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat				
			400.10.3.1	Lembaga Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.10.3.2	Pembangunan Partisipatif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.10.4		Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat				
			400.10.4.1	Budaya Nusantara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.10.4.2	Pemberdayaan Perempuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.10.4.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.10.4.4	Kesejahteraan Sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.10.4.5	Tenaga Kerja Perdesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.10.5		Usaha Ekonomi Masyarakat				
			400.10.5.1	Usaha Pertanian dan Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.10.5.2	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.10.5.3	Produksi dan Pemasaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.10.5.4	Usaha Ekonomi dan Keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.10.5.5	Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.10.6		Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan				
			400.10.6.1	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.10.6.2	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.10.6.3	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.10.6.4	Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		400.10.6.5	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.10.7	Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	400.11		PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN				
		400.11.1	Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.11.2	Pertamanan				
		400.11.2.1	Perencanaan Pertamanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.11.2.2	Taman Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.11.3	Pemakaman				
		400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.11.3.2	Pemakaman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.11.3.3	Pelayanan Pemakaman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.11.4	Jalur Hijau				
		400.11.4.1	Perencanaan Jalur Hijau	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.11.4.2	Jalur Hijau Jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.11.4.3	Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.11.5		Peran Serta Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.11.6		Pengawasan dan Penindakan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.11.6		Pengelolaan Data	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.11.8		Evaluasi dan Pelaporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	400.12			KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
		400.12.1		Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.12.2		Pendaftaran Penduduk				
			400.12.2.1	Identitas Penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.12.2.2	Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.12.2.3	Pindah Datang Penduduk Antar Negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.12.2.4	Pendataan Penduduk Rentan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.12.2.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.12.3		Pencatatan Sipil				
			400.12.3.1	Kelahiran dan Kematian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.12.3.2	Perkawinan dan Perceraian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.12.3.3	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.12.3.4	Pencatatan Kewarganegaraan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.12.3.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.12.4		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
			400.12.4.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.12.4.2	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.12.4.3	Pengelolaan data Administrasi Kependudukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.12.4.4	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.12.4.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.12.5		Pengembangan Kebijakan Kependudukan				
			400.12.5.1	Kuantitas Penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.12.5.2	Kualitas Penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.12.5.3	Mobilitas Penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.12.5.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.12.5.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.12.6		Penyerasian Kependudukan				
			400.12.6.1	Indikator Kependudukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.12.6.2	Proyeksi Penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.12.6.3	Perencanaan Kependudukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.12.6.4	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.12.6.5	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	400.13			KELUARGA BERENCANA				
		400.13.1		Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
		400.13.2		Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk				
			400.13.2.1	Pengumpulan dan pengolahan data	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.2.2	Evaluasi dan pelaporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.3		Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk				
			400.13.3.1	Penyiapan fasilitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.3.2	Evaluasi dan pelaporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.4		Profil dan proyeksi penduduk				

			400.13.4.1	Data profil dan proyeksi penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.4.2	Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.5		Penetapan parameter pengendalian penduduk				
			400.13.5.1	Penetapan sasaran parameter	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.5.2	Evaluasi sasaran parameter	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.6		Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk				
			400.13.6.1	Pemanfaatan profil dan proyeksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.6.2	Pemanfaatan parameter	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.7		Pengembangan Sistem				
			400.13.7.1	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.7.2	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.8		Pengembangan Materi				
			400.13.8.1	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.13.8.2	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.9		Monitoring dan Evaluasi				
			400.13.9.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.9.2	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.10		Analisis Sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.11		Analisis Ekonomi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.12		Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.13		Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.14		Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.15		Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.16		Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah				
			400.13.16.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.13.16.2	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.17		Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.18		Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.19		Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta				
			400.13.19.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.19.2	Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.20		Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan				
			400.13.20.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.20.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.21		Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan				

			400.13.21.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.21.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.22		Kesertaan keluarga berencana pria				
			400.13.22.1	Peningkatan akses keluarga berencana pria	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.22.2	Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.23		Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.24		Pencegahan PMS dan HIV/AIDS	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.25		Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.26		Pelebagaan bina keluarga Balita dan anak				
			400.13.26.1	Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.26.2	Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.27		Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak				

			400.13.27.1	Monitoring bina keluarga Balita dan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.27.2	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.28		Pelebagaan bina ketahanan remaja				
			400.13.28.1	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.28.2	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.29		Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja				
			400.13.29.1	Monitoring bina ketahanan remaja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.29.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.30		Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan				
			400.13.30.1	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.30.2	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.31		Pelebagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan				

			400.13.31.1	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.31.2	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.32		Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan				
			400.13.32.1	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.32.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.33		Pengembangan program usaha ekonomi keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.34		Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.35		Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga				
			400.13.35.1	Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.35.2	Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.36		Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		400.13.37		Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.38		Pelebagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				
			400.13.38.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.38.2	Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.39		Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				
			400.13.39.1	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.39.2	Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.40		Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi				
			400.13.40.1	Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.40.2	Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.41		Advokasi dan pencitraan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.42		Komunikasi, Informasi dan Edukasi				

			400.13.42.1	Promosi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.42.2	Sarana produksi media komunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.42.3	Produk media komunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.43		Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.44		Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota				
			400.13.44.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.44.2	Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.45		Hubungan dengan lembaga non pemerintah				
			400.13.45.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga non pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.45.2	Penguatan hubungan dengan lembaga non pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.46		Tenaga Lini Lapangan				
			400.13.46.1	Pengembangan tenaga lini lapangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.13.46.2	Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.47		Institusi Masyarakat Pedesaan				
			400.13.47.1	Pengembangan institusi masyarakat pedesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.47.2	Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.48		Mekanisme Operasional lini lapangan				
			400.13.48.1	Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.48.2	Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.49		Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan				
			400.13.49.1	Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.49.2	Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.50		Pengumpulan dan pengolahan data	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.51		Analisis dan evaluasi				
			400.13.51.1	Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.13.51.2	Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.52		Sistem aplikasi dan bank data				
			400.13.52.1	Pengembangan sistem aplikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.52.2	Pengelolaan bank data	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.53		Infrastruktur teknologi informasi				
			400.13.53.1	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.53.2	Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.13.54		Dokumentasi dan penyebarluasan informasi				
			400.13.54.1	Dokumentasi dan perpustakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.13.54.2	Pengelolaan situs BKKBN dan media Konferensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	400.14			HUBUNGAN MASYARAKAT				
		400.14.1		Keprotokolan				
			400.14.1.1	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.14.1.2	Buku tamu Keprotokolan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.14.1.3	Agenda kegiatan pimpinan daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.14.1.4	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.14.2		Daftar nama/alamat kantor/pejabat				
		400.14.3		Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas, foto/video/rekaman suara/multi media	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.14.4		Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan				
			400.14.4.1	Kliping koran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.14.4.2	Brosur /Leaflet/poster /plakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.14.4.3	Pengumuman /pemberitaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.14.5		Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah				
			400.14.5.1	Hubungan antar lembaga pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.14.5.2	Hubungan dengan organisasi sosial / LSM	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			400.14.5.3	Hubungan dengan perusahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.14.5.4	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.14.5.5	Forum Kehumasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			400.14.5.6	Hubungan dengan Media Massa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.14.6		Dengar pendapat/hearing DPRD	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.14.7		Bahan/materi pidato/siding Muspida Provinsi/ Kota/Kabupaten	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.14.8		Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.14.9		Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.14.10		Pameran/sayembara/lomba/festival, pembuatan spanduk dan iklan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		400.14.11		Penghargaan/tanda kenang-kenangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		400.14.12		Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
6	500			PEREKONOMIAN				
	500.1			KETAHANAN PANGAN				
		500.1.1		Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.1.2		Ketersediaan dan Kerawanan Pangan				
			500.1.2.1	Ketersediaan Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.1.2.2	Akses Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.1.2.3	Kerawanan Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.1.3		Distribusi dan Cadangan Pangan				
			500.1.3.1	Distribusi Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.1.3.2	Harga Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.1.3.3	Cadangan Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.1.4		Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan				
			500.1.4.1	Konsumsi Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.1.4.2	Penganekaragaman Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.1.4.3	Keamanan Pangan Segar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.1.5		Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan				
			500.1.5.1	Dewan Ketahanan Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.1.5.2	Penghargaan Ketahanan Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.1.6		Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.1.7		Bimbingan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.1.8		Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	500.2			PERDAGANGAN				
		500.2.1		Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.2.2		Perdagangan Dalam Negeri				
			500.2.2.1	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.2.2	Bisa Usaha Jasa Perdagangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.2.2.3	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.2.4	Informasi Perusahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.2.5	Pelaku Pasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.2.6	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.2.11	Pengelolaan Saran Distribusi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.2.2.14	Informasi Pasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.2.15	Informasi Hasil Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.2.16	Barang Strategis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.2.17	Bahan Pokok Agro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.2.3		Standarisasi dan Perlindungan Konsumen				
			500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.3	Perumusan dan Penerapan Standar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.4	Tata Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.5	Kerjasama, Informasi dan Publikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.6	Analisa Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.2.3.7	Bimbingan Konsumen dan Pelaku Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.8	Fasilitas Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.9	Produk Pertambangan dan Aneka Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.10	Produk Pertanian, Kimia dan Kehutanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.11	Jasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.12	Kerjasama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.14	Kelembagaan dan Penilaian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.16	Pengawasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.3.17	Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.2.4		Perdagangan Berjangka Komoditi				
			500.2.4.1	Pengkajian Pasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.4.2	Pengawasan Transaksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.4.4	Pengkajian Pasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.4.5	Pengembangan Pasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.4.6	Sistem Informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.4.7	Pembinaan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.2.4.8	Pengawasan Sistem Gudang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.2.5		Bimbingan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.2.6		Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

	500.3			KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
		500.3.1		Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.3.2		Kelembagaan Koperasi dan UKM				
			500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.3.3		Produksi				
			500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.3.4		Pembiayaan				
			500.3.4.1	Program Pendanaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.3.4.3	Urusan Permodalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.3.5		Pemasaran dan Jaringan Usaha				
			500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.3.5.2	Ekspor dan Impor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.3.6		Pengembangan Sumber Daya Manusia				
			500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.3.6.5	Advokasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.3.7		Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha				
			500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.3.8		Pengkajian Sumber Daya UKMK				
			500.3.8.1	Penelitian Koperasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.3.8.2	Penelitian UKM	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.3.9		Kerjasama Hubungan Antar Lembaga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.3.10		Pedagang Kaki Lima				
			500.3.10.1	Peraturan Perundang-undangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.3.10.2	Sarana dan Pra sarana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	500.5			KELAUTAN DAN PERIKANAN				

		500.5.1		Kebijakan dibidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.5.3		Perikanan Budidaya				
			500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenuhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.3.6	Budidaya Air Tawar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenaga kerjaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.5.4		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				
			500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.2	Pengembangan Produk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.4	Industri Pengolahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.8	Pengembangan Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.17	Pengembangan Ekspor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.18	Pengembangan Impor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.20	Pelayanan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.21	Kemitraan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.22	Ketenaga kerjaan Pengolahan dan Pemasaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.23	Investasi dan Permodalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.4.24	Informasi dan Promosi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.6.13	Sistem Pemantauan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	500.6			PERTANIAN				
		500.6.1		Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.6.2		Perlindungan hortikultura				
			500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.6.3		Perbenihan Hortikultura				
			500.6.3.1	Penilaian Varietas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.6.4		Perluasan dan Pengelolaan Lahan				
			500.6.4.1	Basis Data Lahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.4.2	Pengendalian Lahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.6.5		Pengelolaan Air Irigasi				

			500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.5.3	Iklm, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.5.4	Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.6.6		Pembiayaan Pertanian				
			500.6.6.1	Pembiayaan Program	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait

			500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
		500.6.7		Pupuk Pestisida				
			500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenh Tanah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.7.2	Pupuk Anorganik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.7.3	Pestisida	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.6.8		Alat dan Mesin Pertanian		Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	

			500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.6.9		Perbenihan Tanaman Pangan				
			500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.9.2	Produksi Benih Serealia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.9.4	Kelembagaan Benih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.6.10		Budidaya Serealia				
			500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.10.3	Jagung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.6.10.4	Serealia Lain	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.6.11		Budidaya Aneka Kacang dan Umbi				
			500.6.11.1	Kedelai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.11.2	Ubi Kayu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.11.3	Aneka Kacang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.11.4	Aneka Umbi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.6.12		Tanaman Pangan				
			500.6.12.1	Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.12.3	Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.6.13		Pasca panen Tanaman Pangan				
			500.6.13.1	Padi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.6.13.2	Jagung dan Serealia alin	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.13.4	Aneka Umbi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.6.14		Pengolahan Hasil Pertanian				
			500.6.14.1	Tanaman Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.14.2	Hortikultura	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.14.3	Perkebunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.14.4	Peternakan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.6.15		Mutu dan Standarasi				
			500.6.15.1	Standardisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.6.16		Pengembangan Usaha dan Investasi				
			500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.16.2	Investasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.16.4	Promosi Luar Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.6.17		Pemasaran Domestik				
			500.6.17.1	Informasi Pasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.17.4	Jaringan Pemasaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		500.6.18		Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, TOR/Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.6.19		Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan				
			500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.6.20		Diseminasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.6.21		Publikasi Hasil Penelitian/Pengkajian				
			500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.6.22		Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.6.23		Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.6.24		Data Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		500.6.25		Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.6.26		Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)				
			500.6.26.1	Hak Cipta	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.26.2	Hak Paten Sederhana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.26.3	Hak Paten Biasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.26.4	Hak Merek	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.26.7	Permohonan HKI yang ditolak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.6.27		Pelayanan Perijinan Pertanian				
			500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.6.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.6.28		Pelayanan Hukum				
			500.6.28.1	Sertifikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.28.2	Pertimbangan Hukum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.6.29		Karantina Pertanian				
			500.6.29.1	Karantina Tumbuhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.6.29.2	Karantina Hewan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.6.30		Bimbingan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.6.31		Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	500.7			PETERNAKAN				
		500.7.1		Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.7.2		Peternakan dan Kesehatan Hewan				

			500.7.2.1	Perbibitan Ternak, Antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan /Pengeluaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.7.2.2	Pakan Ternak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.7.2.3	Budidaya Ternak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.7.2.4	Kesehatan Hewan, Antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.7.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		500.7.3		Bimbingan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.7.4		Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	500.8			PERKEBUNAN				
		500.8.1		Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.8.2		Tanaman Semusim				
			500.8.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.8.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.8.3		Tanaman Rempah & Penyegar				
			500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.8.3.3	Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.8.4		Tanaman Tahunan				
			500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.8.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.8.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.8.5		Perlindungan Perkebunan				
			500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.8.6		Pascapanen dan Pembinaan Usaha				

			500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.8.7		Bimbingan Teknis Perkebunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.8.8		Evaluasi Perkebunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	500.9			PERINDUSTRIAN				
		500.9.1		Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.9.2		Iklm Usaha dan Kerja Sama				
			500.9.2.1	Industri Manufaktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.9.2.2	Industri Agro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.9.3		Promosi Industri				
			500.9.3.1	Industri Manufaktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.9.3.2	Promosi Industri Agro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.9.4		Standarisasi dan Teknologi				
			500.9.4.1	Industri Manufaktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.9.4.2	Industri Agro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.9.5		Hak dan Kekayaan Intelektual				
			500.9.5.1	Industri Manufaktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.9.5.2	Industri Agro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.9.6		Industri Hijau				
			500.9.6.1	Industri Manufaktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.9.6.2	Industri Agro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.9.7		Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten /Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.9.8		Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.9.9		Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.9.10		Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		500.9.11		Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.9.12		Standarisasi				
			500.9.12.1	Standar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.9.12.2	Penyiapan Penerapan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.9.12.3	Infrastruktur Standar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.9.13		Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri				
			500.9.13.1	Kebijakan Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.9.14		Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup				
			500.9.14.1	Industri Hijau	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.9.14.2	Lingkungan Hidup	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.9.14.3	Energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.9.15		Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual				
			500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.9.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.9.16		Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	500.10			ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
		500.10.1		Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.10.2		Rekomendasi Kegeologian				
			500.10.2.1	Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			500.10.2.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.2.3	Pertambangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.2.4	Panas Bumi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.2.5	Geosains	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			500.10.2.6	Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.2.7	Kelayakan Lingkungan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.10.3		Penelitian Kegeologian				
			500.10.3.1	Administrasi pelaksanaan penelitian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.3.2	Administrasi tenaga penelitian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			500.10.3.3	Administrasi penggunaan peralatan penelitian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.3.4	Log-book peralatan survei/peralatan uji /kalibrasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.3.5	Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.3.6	Sumber Daya Geologi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			500.10.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.3.9	Survei Geologi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.10.4		Inventarisasi dan evaluasi kegeologian				
			500.10.4.1	Sumber Daya Geologi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.4.4	Survei Geologi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.4.5	Konservasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.10.5		Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi				

			500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunung api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.5.4	Survei Geologi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.10.6		Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi				

			500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.6.4	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.10.7		Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi				

			500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			500.10.7.3	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksplorasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis /Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.7.4	Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak KKS	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.7.7	Partisipasi Interest	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.10.8		Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi				
			500.10.8.1	Perumusan Pedoman, Prosedur Layanan serta Pengawasan Usaha Pengolahan, pengangkutan, Penyiapan dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi Hasil Olahan dan Bahan Bakar antara lain: Pedoman dan Prosedur Layanan Usaha (Izin/Rekomendasi/ Penandasahan), Pengawasan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			500.10.8.2	Fasilitasi dan Pertimbangan pelanggaran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.10.9		Teknik dan Lingkungan				
			500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI)/Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), Antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			500.10.9.3	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/Procedure Qualification Record (PQR)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan	Biasa			Unit Kerja Terkait

			500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, Antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja, Antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.9.10	Usaha penunjang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.10.10		Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi				

			500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.10.11		Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi				
			500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi EBT	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.11.7	Road Mad di Bidang EBT	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.10.12		Panas Bumi				
			500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi Welding Procedure Specification (WPS) dan Procedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.12.8	Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.12.11	Penetapan kapasitas usaha panas bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaaliasi Obvitnas Bidang Panas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.10.13		Bioenergi				
			500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.13.6	Database Perusahaan Bioenergi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.13.9	Usul Program Bio energi Pemerintah Daerah dan Lembaga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.10.14		Konservasi Energi				
			500.10.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/ teknologi efisiensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.15.9	Invesment Grade Audit (IGA)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.10.16		Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE				
			500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.10.17		Bina Program Tenaga Listrik				
			500.10.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik, Antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.17.2	Pengembangan listrik pedesaan, Antara lain: Data program listrik pedesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik pedesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.10.18		Bina Usaha Ketenagalistikan				

			500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, Antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.18.3	Hubungan komersial tenaga listrik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.18.4	Perlindungan konsumen listrik, Antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.10.19		Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan				
			500.10.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.10.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.19.4	Perlindungan ketengalistrikan, antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sector ketengalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi <i>Clean Development Mechansim</i> (CDM)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.10.20		Sertifikasi				
			500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.10.21		Akreditasi Ketenagalistrikan				
		500.10.22		Standarisasi Kompetensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.10.23		Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan				
			500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.10.24		Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan				
			500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.24.5	Laporan hasil pengawas penunjukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.10.25		Bina Program Mineral dan Batubara				
			500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.25.4	Data dan Informasai Mineral dan Data dan Informasi Mineral dan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.10.26		Pembinaan Pengusahaan Mineral				
			500.10.26.1	Ketenagakerjaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.26.9	Pengelolaan Barang Kontrak Karya (KK)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.26.12	Teguran kepada pengusaha Kontrak Karya (KK)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.26.13	Tanggapan kepada Pemerintah Daerah terkait usaha pertambangan mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.26.17	Penerbitan sertifikat <i>Clear and Clean</i> (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.10.27		Pembinaan Pengusahaan Batubara				
			500.10.27.1	Ketenagakerjaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.27.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.27.6	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut) antara lain: laporan produksi dan penjualan batubara PKP2B, IUP hingga laporan kontrak penjualan pertambangan batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.27.9	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), Antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.27.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.10.27.12	Teguran kepada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.27.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.27.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.27.15	Pelaporan usaha pertambangan batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.27.16	Penghargaan usaha pertambangan batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.27.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.10.28		Penerimaan Negara				
			500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.10.29		Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara				

			500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), Antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/ Wakil Kepala Teknik Tambang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, Antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/ Statiistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang, Antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.29.8	Rekomendasi bahan kimia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/ Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.29.10	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/laporan tahunan, Antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) pelaksanaan reklamasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.29.11	Pemberian Penghargaan, Antara lain Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselamatan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.29.12	Pengawasan Lingkungan Pertambangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.10.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.29.14	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Mineral dan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.29.15	Rekomendasi Teknis, Antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.29.16	Persetujuan Teknis, Antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.29.17	Pengawasan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.29.18	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.29.19	Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.10.30		Program Penelitian dan Pengembangan				
			500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.30.2	Pengembangan dan inovasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.10.30.3	Dokumen penerapan/pemanfaatan /pendayagunaan/replikasi/prototype hasil penelitian/pengkajian/ pengembangan /inovasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.30.5	Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.30.6	Pembinaan penelitian/Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.30.9	Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.30.11	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.10.30.12	Layanan Jasa Penelitian, Pengembangan, Penerapan IPTEK	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.10.31		Sarana Litbang				
			500.10.31.1	Administrasi penggunaan peralatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.31.2	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.10.32		Afiliasi				
			500.10.32.1	Proyek Percontohan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.32.4	Penyajian Informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.10.33		Penelitian dan Pengembangan Kegeologian				
			500.10.33.1	Pemetaan dan Penelitian geologi, geokimia dan geofisika kelautan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.10.33.2	Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan Kewilayahan Pantai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.33.3	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.33.4	Penelitian sumber daya mineral kelautan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.10.34		Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi				
			500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.34.2	Teknologi Eksploitasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.34.3	Laboratorium	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.34.4	Study	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.34.5	Teknologi Proses	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.34.7	Teknologi Gas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.10.35		Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara				

			500.10.35.1	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.35.2	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.35.3	Teknologi Pemanfaatan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.10.36		Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan				
			500.10.36.1	Energi baru terbarukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.36.2	Teknologi Ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.36.3	Lingkungan dan Konservasi Energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.10.36.4	Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	500.11			PERHUBUNGAN				
		500.11.1		Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.11.2		Jaringan Prasarana dan Pelayanan				

			500.11.2.1	Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.2.2	Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B dan tipe C	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.2.3	Penetapan lokasi terminal barang utama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.2.4	Standard pelayanan minimal pengoperasian terminal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.2.5	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.2.6	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.2.7	Penetapan kelas jalan primer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.2.8	Kualifikasi teknis petugas terminal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.2.9	Jaringan transportasi jalan sekunder	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.11.3		Pengembangan Transportasi Jalan				
			500.11.3.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.3.2	Pengembangan transportasi jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		500.11.4		Pengujian Kendaraan Bermotor				
			500.11.4.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.4.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.4.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.4.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.11.5		Teknologi Kendaraan Bermotor				
			500.11.5.1	Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.5.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.5.3	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.5.4	Harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.11.6		Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				
			500.11.6.1	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		500.11.7		Perlengkapan Jalan				
			500.11.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jaalan nasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.11.8		Angkutan Penumpang				
			500.11.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas Negara dan antar kota/provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.8.7	Angkutan perintis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.11.9		Angkutan Barang				
			500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.9.2	Tarif angkutan barang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.11.10		Monitoring Operasional				
			500.11.10.1	Pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.11.10.3	Berkas pelanggaran Perda	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.11.11		Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil				
			500.11.11.1	Pedoman Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.11.11.3	Bimtek PPNS	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.11.12		Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan				
			500.11.12.1	Pendataan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.12.2	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.11.13		Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan				
			500.11.13.1	Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, <i>blueprint</i> jaringan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.11.14		Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.11.15		Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan				

			500.11.15.1	Perawatan dan pemeliharaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.15.2	Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.11.16		Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				
			500.11.16.1	Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.16.2	Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.16.3	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.16.4	Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungi, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.11.17		Kualifikasi Teknis Petugas Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.11.18		Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan				
			500.11.18.1	Manajemen lalu lintas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.18.2	Tata cara berlalulintas di sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.11.18.3	Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas angkutan sungai dan danau	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.18.4	Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.11.19		Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan				
			500.11.19.1	Pengerukan alur pelayaran sungai, danau kolam pelabuhan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.19.2	Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.19.3	Perambuan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.11.20		Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan				
			500.11.20.1	Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.20.2	Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.11.21		Tarif Keperintisan				
			500.11.21.1	Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.11.21.2	Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.11.22		Bina Sistem Transportasi Perkotaan				
			500.11.22.1	Jaringan Transportasi Perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.22.2	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.22.3	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.11.23		Lalu Lintas Perkotaan				
			500.11.23.1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.23.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di nasional dalam kawasan perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.23.3	Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.11.24		Angkutan Perkotaan				
			500.11.24.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.24.2	Jaringan trayek perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.11.24.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.11.25		Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan				
			500.11.25.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.25.2	Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.11.25.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.11.26		Dampak Transportasi Perkotaan				
			500.11.26.1	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.26.3	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.11.27		Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan				
			500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.27.2	Kualifikasi unit pengkajian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.11.28		Pengembangan Keselamatan				
			500.11.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.28.2	Harmonisasi kebijakan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.11.29		Promosi dan Kemitraan Keselamatan				

			500.11.29.1	Promosi keselamatan: penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.11.30		Bina Keselamatan Angkutan Umum				
			500.11.30.1	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.30.2	Keselamatan awak angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.11.31		Audit Keselamatan				
			500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan, sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.11.32		Inspeksi Keselamatan				
			500.11.32.1	Pedoman keselamatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.11.32.2	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana sumber daya manusia dan pelaku transportasi jalan, sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.11.33		Parkir				
			500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.33.2	Izin tempat khusus parker swasta	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	500.12			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
		500.12.1		Kebijakan di bidang komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.12.2		Telekomunikasi				
			500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.12.3		Penyiaran				
			500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.12.4		Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal				
			500.12.4.1	Telekomunikasi khusus Pemerintah Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.12.4.2	Telekomunikasi khusus Non Pemerintah Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.12.5		Pengendalian Informatika				
			500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.12.6		e-Government				Unit Kerja Terkait
			500.12.6.1	Tata kelola e-Government	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.12.6.2	Teknologi dan infrastruktur e-Government	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.12.6.4	Aplikasi Layanan Pemerintahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.12.7		e-Business				
			500.12.7.1	Tata kelola e-Business	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Business	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.12.8		Pemberdayaan Informatika Masyarakat				
			500.12.8.1	Pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.12.8.2	Pemberdayaan informatika masyarakat pedesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.12.9		Pemberdayaan industri informatika				

			500.12.9.1	Industri infrastruktur dan layanan aplikasi informatika	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.12.9.2	Industri perangkat informatika pengguna	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.12.9.3	Industri perangkat lunak	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.12.9.4	Industri konten multimedia	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.12.10		Keamanan Informasi				
			500.12.10.1	Tata kelola keamanan informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.12.10.2	Teknologi keamanan informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.12.10.3	Monitoring, evaluasi dan tanggap darurat kemanan informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.12.10.4	Penyidikan dan penindakan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.12.10.5	Budaya keamanan informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.12.11		Komunikasi Publik				
			500.12.11.1	Tata kelola komunikasi publik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.12.11.2	Pengelolaan opini publik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.12.11.3	Layanan komunikasi publik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.12.12		Pengolahan dan Penyediaan Informasi				
			500.12.12.1	Informasi politik, hukum dan keamanan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait

			500.12.12.2	Informasi perekonomian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.12.12.3	Informasi kesejahteraan rakyat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.12.13		Pengelolaan Media Publik				
			500.12.13.1	Media cetak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.12.13.2	Media online	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.12.13.3	Media luar ruang dan audio visual	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.12.14		Kemitraan Komunikasi				
			500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.12.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.12.15		Infrastruktur Informatika				
			500.12.15.1	Jaringan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			500.12.15.2	Piranti Teknologi Informatika	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.12.15.3	Keamanan Informatika	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
		500.12.16		Sistem dan Data				
			500.12.16.1	Portal dan Konten	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.12.16.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			500.12.16.3	Pengembangan Aplikasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.12.17		Pusat Kerjasama				
			500.12.17.1	Kerjasama Pusat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.12.17.2	Kerjasama Bilateral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.12.18		Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat				
			500.12.18.1	Pelayanan Informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.12.18.2	Hubungan Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.12.18.3	Bimbingan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.12.19		Evaluasi				
	500.13			PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				

		500.13.1		Kebijakan dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.13.2		Pengembangn Destinasi Wisata				
			500.13.2.1	Perancanga destinasi dan investasi pariwisata	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.13.2.2	Pengembangan daya tarik wisata	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.13.2.3	Industri pariwisata	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.13.2.4	Pengembangan masyarakat destinasi pariwisata	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.13.2.5	Pengembangan wisata minat khusus, konvesi, insentif dan event	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.13.3		Pemasaran Pariwisata				
			500.13.3.1	Pengembangan pasar dan informasi pariwisata	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.13.3.2	Promosi pariwisata luar negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.13.3.3	Promosi pariwisata dalam negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.13.3.4	Pencitraan Indonesia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.13.4		Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya				
			500.13.4.1	Pengembangan industri perfilman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.13.4.2	Pengembangan seni pertunjukan dan industri music	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.13.4.3	Pengembangan seni rupa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.13.5		Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK				
			500.13.5.1	Pengembangan ekonomi kreatif berbasis media	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.13.5.2	Desain dan Arsitektur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.13.5.3	Kerjasama dan fasilitasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.13.6		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
			500.13.6.1	Penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.13.6.2	Penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.13.6.3	Pengembangan SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.13.6.4	Kompetensi kepariwisataan dan ekonomi kreatif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	500.14			STATISTIK				
		500.14.1		Kebijakan di bidang statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.14.2		Sensus Penduduk, Pertanian dan Ekonomi				
			500.14.2.1	Perencanaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.14.2.2	<p>Persiapan, antara lain: penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, penyusunan kuisioner, penyusunan konsep dan definisi, penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada <i>stakeholder</i> dan suber data (<i>leaflet</i>, poster, pertemuan), pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), pelaksanaan pelatihan petugas, penyusunan program pengolahan (<i>rule</i>, validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), pelatihan petugas pengolahan, perancangan tebel, pelaksanaan uji coba</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.14.2.3	Pelaksanaan lapangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.14.2.4	Pengolahan, antara lain: pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/ <i>batching</i> ), pemeriksaan dokumen dan pengkodean ( <i>editing/coding</i> ), perekaman data ( <i>entri, scanner</i> ), tabulasi data, pemeriksaan tabulasi, laporan konsistensi tabulasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.14.2.5	Analisis dan penyajian hasil sensus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.14.3		Survei				
			500.14.3.1	Perencanaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			500.14.3.2	Persiapan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.14.3.3	Pelaksanaan lapangan, antara lain: pelaksanaan listing, pemilihan sampel, pengumpulan data, pemeriksaan, pengawasan lapangan, monitoring kualitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.14.3.4	Pengolahan, antara lain: pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/ <i>batching</i> ), pemeriksaan dokumen dan pengkodean ( <i>editing/coding</i> ), perekaman data ( <i>entri, scanner</i> ), tabulasi data, pemeriksaan tabulasi, laporan konsistensi tabulasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.14.3.5	Analisis dan penyajian hasil survei, antara lain: pembahasan angka hasil pengolahan, penyusunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			500.14.3.6	Diseminasi hasil survei	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.14.4		Konsolidasi Data Statistik				
			500.14.4.1	Kompilasi data	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.14.4.2	Analisis data	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.14.4.3	Penyusunan publikasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

		500.14.5		Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei dan Konsolidasi Data Statistik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
	500.15			KETENAGAKERJAAN				
		500.15.1		Kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.15.2		Perencanaan Tenaga Kerja				
			500.15.2.1	Perencanaan tenaga kerja perusahaan pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.2.2	Perencanaan tenaga kerja perusahaan swasta	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.15.3		Pengembangan Standarisasi Kompetensi				
			500.15.3.1	Penerapan standar kompetensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.3.2	Pengembangan standarisasi kompetensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.3.3	Pengembangan program pelatihan ketenagakerjaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.3.4	Pengembangan program pelatihan produktivitas dan kewirausahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.15.3.5	Pengembangan program pelatihan ketransmigrasian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.15.4		Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja				
			500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.4.2	Pengembangan sarana dan fasilitas lembaga pelatihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.4.3	Pengembangan standar mutu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.4.4	Sistem, pendanaan dan kerjasama antar lembaga	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.15.5		Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan				
			500.15.5.1	Instruktur dan PSM lembaga pelatihan pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.5.2	Instruktur lembaga pelatihan swasta	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.5.3	Tenaga pelatihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.15.5.4	Sistem informasi instruktur, PSM dan tenaga pelatihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.15.6		Bina Pemagangan				
			500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.15.7		Produktivitas dan Kewirausahaan				
			500.15.7.1	Pengembangan promosi dan kerjasama produktivitas dan kewirausahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.7.2	Pengembangan sistem dan peningkatan produktivitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.7.3	Pengembangan pengukuran dan kajian produktivitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.7.4	Pengembangan kewirausahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.15.8		Pengembangan Pasar Kerja				
			500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.8.3	Bursa Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.8.4	Analisis Jabatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.15.9		Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri				
			500.15.9.1	Antar Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.15.10		Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal				
			500.15.10.1	Tenaga kerja mandiri dan sektor informal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.10.4	Pemberdayaan pendampingan dan kerjasama antar lembaga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.15.11		Standarisasi Profesi				
			500.15.11.1	Sistem informasi dan regitrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.11.2	Pembakuan akreditasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.15.12		Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi				
			500.15.12.1	Peraturan perusahaan dan perjanjian kerjasama bersama	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.15.12.2	Perjanjian kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			500.15.12.3	Kesejahteraan pekerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.15.12.4	Analisis diskriminasi syarat kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.15.13		Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial				
			500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.13.3	Pemasyarakatan Hubungan Industrial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.15.14		Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial				

			500.15.14.1	Pengupahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.15.15		Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian hubungan Industrial				
			500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.15.15.2	Penyelenggaraan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.15.15.3	Pemberdayaan kelembagaan dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

		500.15.16		Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				
			500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerjadan Perlindungan Berserikat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.15.17		Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak				
			500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.15.17.3	Kerjasama lintas sektoral	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.15.17.4	Advokasi tenaga kerja perempuan dan anak	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.15.18		Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
			500.15.18.1	Pengawasan norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			500.15.18.2	Pengawasan norma konstruksi bangunan, listrik dan penanggulangan kebakaran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.15.18.3	Pengawasan norma kesehatan kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.15.18.4	Pengawasan norma lingkungan kerja dan bahan berbahaya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.15.18.5	Pengawasan norma kelembagaan, keahlian dan sistem manajemen K3	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

		500.15.19		Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.15.20		Bina Penegakkan Hukum				
			500.15.20.1	Pemeriksaan norma ketenagakerjaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.15.20.2	Penyidikan norma ketenagakerjaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.15.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			500.15.20.4	Kerjasama penegakkan hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.15.21		Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)				
			500.15.21.1	Analisis dan standarisasi bidang K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.21.2	Hasil kajian, pernyaaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.21.3	Bimbingan teknis dan evaluasi pengkajian K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.21.4	Bimbingan teknis dan evaluasi pelayanan K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.15.22		Pengembangan SDM dan Kompetensi K3				
			500.15.22.1	Program, analisis dan standarisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.22.2	Penyebarluasan informasi pengembangan SDM dan kompetensi K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.22.3	Kerjasama tingkat nasional bidang pengembangan SDM dan kompetensi K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.15.22.4	Kerjasama tingkat regional bidang pengembangan SDM dan kompetensi K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.22.5	Kerjasama tingkat internasional bidang pengembangan SDM dan kompetensi K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.15.22.6	Bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan SDM dan kompetensi K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	500.16			PENANAMAN MODAL				
		500.16.1		Kebijakan di bidang penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.16.2		Perencanaan Penanaman Modal				
			500.16.2.1	Perencanaan industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.16.2.2	Perencanaan industry manufaktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.16.2.3	Perencanaan jasa dan kawasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.16.2.4	Perencanaan infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.16.3		Pengembangan Iklim Penanaman Modal				
			500.16.3.1	Deregulasi penanaman modal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.16.3.2	Pengembangan potensi daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.16.3.3	Pemberdayaan usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.16.3.4	Pemberdayaan usaha pembinaan dan penyuluhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.16.3.5	Pemberdayaan usaha kemitraan usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.16.3.6	Pemberdayaan usaha pelayanan usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.16.4		Promosi Penanaman Modal				
			500.16.4.1	Pengembangan promosi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.16.4.2	Analisis strategi promosi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.16.4.3	Fasilitasi promosi luar negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.16.4.4	Promosi sectoral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.16.4.5	Fasilitasi promosi daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.16.4.6	Pameran dan sarana promosi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.16.5		Kerjasama Penanaman Modal				

			500.16.5.1	Kerjasama bilateral dan multilateral	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.16.5.2	Kerjasama regional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.16.5.3	Kerjasama dunia usaha internasional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.16.6		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				
			500.16.6.1	Pemantauan penanaman modal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			500.16.6.2	Data realisasi penanaman modal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.16.6.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.16.6.4	Fasilisati penyelesaian masalah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.16.6.5	Pengawasan penanaman modal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			500.16.6.6	Pencabutan/pembatalan perizinan penanaman modal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.16.7		Pelayanan Penanaman Modal				
			500.16.7.1	Pelayanan aplikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.16.7.2	Pelayanan perizinan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.16.7.3	Pelayanan konsultasi perizinan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.16.7.4	Pelayanan nmon perizinan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.16.7.5	Pelayanan fasilitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	500.17			PERTANAHAN				
		500.17.1		Kebijakan di bidang pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.17.2		Pengadaan dan penataan administrasi pertanahan				

			500.17.2.1	Fasilitasi pengadaan tanah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.17.2.2	Pembinaan dan pengendalian administrasi pertanahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.17.2.3	Data dan informasi pertanahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.17.2.4	Advokasi dan pengendalian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.17.3		Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah				

			500.17.3.1	Penatagunaan tanah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.17.3.2	Data dan pemetaan tematik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.17.3.3	Penguatan atas tanah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.17.4		Sengketa Tanah				
			500.17.4.1	Pengkajian dan penanganan sengketa	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			500.17.4.2	Advokasi dan pengendalian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
	500.18			TRANSMIGRASI				
		500.18.1		Kebijakan di bidang transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.18.2		Penyediaan tanah transmigrasi				
			500.18.2.1	Fasilitasi pengadaan tanah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.18.2.2	Pengurusan legalitas tanah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			500.18.2.3	Dokumentasi pertanahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.18.2.4	Advokasi pertanahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.18.3		Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi				
			500.18.3.1	Penyiapan lahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.18.3.2	Penyiapan sarana	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			500.18.3.3	Penyiapan prasarana	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.18.3.4	Evaluasi kelayakan permukiman	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.18.4		Fasilitasi Penempatan Transmigrasi				
			500.18.4.1	Penyiapan calon transmigrasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.18.4.2	Penyiapan perpindahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.18.4.3	Pelaksanaan perpindahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.18.4.4	Penataan dan adaptasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.18.5		Partisipasi Masyarakat				

			500.18.5.1	Promosi dan motivasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.18.5.2	Kerjasama kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.18.5.3	Kerjasama antar daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.18.5.4	Pelayanan investasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.18.6		Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi				
			500.18.6.1	Perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.18.6.2	Bina sistem informasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			500.18.6.3	Perencanaan pengembangan kawasan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.18.6.4	Perencanaan pengembangan masyarakat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.18.6.5	Perencanaan pengembangan pusat pertumbuhan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.18.7		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusi dan Masyarkat				
			500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.18.7.2	Fasilitas sosial budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.18.7.3	Pengembangan kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			500.18.7.4	Bina pendampingan masyarakat transmigrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.18.8		Pengembangan Usaha				
			500.18.8.1	Kewirausahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.18.8.2	Produksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.18.8.3	Pengolahan Hasil dan pemasaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.18.8.4	Lembaga ekonomi dan permodalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		500.18.9		Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan				
			500.18.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.18.9.2	Pengembangan sarana	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			500.18.9.3	Pengembangan prasarana	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			500.18.9.4	Evaluasi pengembangan sarana dan prasarana	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		500.18.10		Penyerasian lingkungan				
			500.18.10.1	Persiapan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.18.10.2	Adaptasi dan mitigasi lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			500.18.10.3	Evaluasi perkembangan permukiman transmigrasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			500.18.10.4	Evaluasi perkembangan purat pertumbuhan.	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
7	600			PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN				
	600.1			PEKERJAAN UMUM				
		600.1.1		Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.1.2		Penatagunaan Sumber Daya Air				
			600.1.2.1	Perencanaan Wilayah Sungai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			600.1.2.2	Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.2.3	Pemanfaatan Sumber Daya Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.2.4	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			600.1.2.5	Pengaturan dan Pemantauan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		600.1.3		Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air				
			600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			600.1.3.2	Manajemen Mutu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.1.4		Pengelolaan Sumber Daya Air				

			600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.1.5		Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air				
			600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.5.5	Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.1.6		Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional)				
			600.1.6.1	Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			600.1.6.2	Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.6.3	Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.6.4	Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.6.5	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.1.7		Pengembangan Jaringan Jalan				
			600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.1.8		Pembangunan Jalan				
			600.1.8.1	Standar dan Pedoman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.8.2	Manajemen Konstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.8.3	Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan dan Drainage	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.1.9		Preservasi Jalan				
			600.1.9.1	Standar dan Pedoman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.9.2	Perencanaan Teknis	Terbatas			Unit Kerja Terkait
			600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			000.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.1.10		Pengelolaan Jembatan				
			600.1.10.1	Standar dan Pedoman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.10.2	Perencanaan Teknis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			600.1.10.3	Teknik Jembatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		600.1.11		Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah				
			600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.1.12		Pengaturan Jalan Tol				
			600.1.12.1	Persiapan perusahaan jalan tol	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.12.4	Pengambilalihan perusahaan jalan tol	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.1.13		Keterpaduan Infrastruktur Permukiman				
			600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		600.1.14		Pengembangan Kawasan Permukiman				
			600.1.14.1	Perencanaan Teknis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.14.5	Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.1.15		Pembinaan Penataan Bangunan				

			600.1.15.1	Perencanaan Teknis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.15.5	Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.1.16		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				
			600.1.16.1	Perencanaan Teknis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.16.5	Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.1.17		Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman				
			600.1.17.1	Perencanaan Teknis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.1.17.5	Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.1.18		Pemantauan dan Evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
	600.2			PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				
		600.2.1		Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.2.2		Perencanaan Pembiayaan Perumahan				
			600.2.2.1	Keterpaduan Perencanaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			600.2.2.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			600.2.2.3	Kemitraan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		600.2.3		Pola Pembiayaan Perumahan				
			600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.2.4		Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan				
			600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.4.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		600.2.5		Perencanaan Penyediaan Perumahan				
			600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			600.2.5.2	Analisa Teknik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		600.2.6		Penyediaan Rumah Susun				
			600.2.6.1	Perencanaan Teknik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			600.2.6.2	Penyediaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.6.3	Penghunan, Pengalihan, dan Pemanfaatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.6.4	Pengelolaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.2.7		Penyediaan Rumah Khusus				
			600.2.7.1	Perencanaan Teknik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.7.5	Perencanaan Teknik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.2.8		Penyediaan Rumah Umum dan Komersial				

			600.2.8.1	Perencanaan Teknik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.8.3	Fasilitas Hunian Berimbang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.8.4	Fasilitas Penyediaan Lahan Perumahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.2.9		Investasi Infrastruktur				
			600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.9.3	Fasilitas dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			600.2.9.4	Pasar Infrastruktur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		600.2.10		Penyelenggaraan Jasa Konstruksi				

			600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			600.2.10.2	Kontrak Konstruksi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.10.4	Manajemen Mutu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.2.11		Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi				
			600.2.11.1	Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.2.12		Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi				
			600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.12.2	Penerapan Kompetensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.2.13		Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi				
			600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.2.14		Peningkatan Jasa Konstruksi				

			600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.2.15		Penerapan Teknologi Konstruksi				
			600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.15.2	Pengembangan Materi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.2.16		Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)				
			600.2.16.1	Antar Sektor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.16.2	Antar Wilayah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.2.17		Pengembangan Kawasan Strategis				

			600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antar kawasan Strategis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.2.18		Pengembangan Kawasan Perkotaan				
			600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.2.19		Pemantauan dan Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	600.3			TATA RUANG (TATA KOTA)				
		600.3.1		Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		600.3.2		Perencanaan				
			600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			600.3.2.7	Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kota Prasarana Kota	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		600.3.3		Pemanfaatan dan Pengendalian				
			600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		600.3.4		Pemetaan				
			600.3.4.1	Peta Dasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.3.4.2	Survei Pemetaan Ruang Darat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.3.4.3	Survei Pemetaan Ruang Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.3.4.4	Survei Pemetaan Ruang Udara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	600.4			LINGKUNGAN HIDUP				
		600.4.1		Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.4.2		Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				
			600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		600.4.3		Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor				
			600.4.3.1	Evaluasi Penerapan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.4.4		Ekonomi Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.4.5		Dampak Lingkungan				
			600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.4.6		Pemantauan dan Pengawasan				
			600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		600.4.7		Evaluasi dan Pengembangan				
			600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana, dan Jasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.4.8		Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan				
			600.4.8.1	Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.8.2	Pemanfaatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.8.4	Keamanan Hayati	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.4.9		Kerusakan Ekosistem Perairan Darat				

			600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.9.2	Rawa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.4.10		Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer				
			600.4.10.1	Perangkat mitigasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.4.11		Adaptasi Perubahan Iklim				
			600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.4.12		Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun				

			600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.4.13		Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun				
			600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.4.14		Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3				
			600.4.14.1	Pemantauan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.14.2	Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.4.15		Pengelolaan Sampah				

			600.4.15.1	Pembatasan sampah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.15.4	Penetapan pemenang adipura	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.4.16		Hukum Administrasi Lingkungan				
			600.4.16.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.16.2	Penataan hukum administrasi lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.4.17		Penyelesaian Sengketa Lingkungan				
			600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.4.18		Penegakan hukum pidana lingkungan				
			600.4.18.1	Penyidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.4.19		Komunikasi Lingkungan				
			600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.4.20		Penguatan Inisiatif Masyarakat				
			600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.20.2	Kearifan Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.4.21		Peningkatan Peran Masyarakat				
			600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.4.22		Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan				
			600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.4.23		Data dan Informasi Lingkungan				
			600.4.23.1	Pengelolaan Data	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.23.2	Pengelolaan Informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.4.24		Kelembagaan Lingkungan				
			600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata Laksana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		600.4.25		Standarisasi dan teknologi				
			600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan Pengujian Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.25.2	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.25.3	Teknologi Ramah Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		600.4.26		Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan				
			600.4.26.1	Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			600.4.26.2	Laboratorium Rujukan dan Pengujian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
8	700			PENGAWASAN				
	700.1			PENGAWASAN INTERNAL				
		700.1.1		Rencana Pengawasan				
			700.1.1.1	Rencana Strategis Pengawasan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			000.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		700:01:02		Pelaksanaan Pengawasan				
			700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	Sangat Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara.	Unit Kerja Terkait
			700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait

			700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			700.1.2.9	Good Corporate Governance (GCG)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
9	800			KEPEGAWAIAN				

	800.1			SUMBER DAYA MANUSIA				
		800.1.1		Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara				
			800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan data kebutuhan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi Antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			800.1.1.4	Standarisasi Jabatan Antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		800.1.2		Formasi dan Pengadaan Pegawai				
			800.1.2.1	Formasi ASN Antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN Antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.1.2.5	Pengangkatan ASN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.1.2.6	Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		800.1.3		Mutasi Pegawai				
			800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		800.1.4		Pengembangan Karir				

			800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			800.1.4.2	Penyesuaian ijazah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			800.1.4.5	Angka Kredit Antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		800.1.5		Kinerja Aparatur Sipil Negara				
			800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		800.1.6		Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN				

			800.1.6.1	Kode Etik Pegawai	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			800.1.6.2	Disiplin	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			800.1.6.5	Pemberhentian Sementara	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait

			800.1.6.6	Pensiun ASN Antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN,	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.1.6.7	Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/ Dudanya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		800.1.7		Bantuan Hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		800.1.8		Status dan Kedudukan Pegawai				
			800.1.8.1	Status Kepegawaian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.1.8.3	Keberatan Pegawai	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait

			800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
		800.1.9		Sistem Informasi Kepegawaian				
			800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		800.1.10		Pengawasan dan pengendalian				
			800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		800.1.11		Administrasi Pegawai				
			800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.1.11.2	Cuti Sakit	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.1.11.3	Cuti Bersalin	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			800.1.11.4	Cuti Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.1.11.5	Cuti Alasan Penting	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.1.11.6	Cuti Besar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.1.11.7	Cuti Di Luar Tanggungan Negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait

			800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala Mutasi gaji/tunjangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		800.1.12		Kesejahteraan Pegawai				
			800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.1.12.3	Tabungan Perumahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.1.12.4	Bantuan Sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal karna dinas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.1.12.10	Rekam Medis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		800.1.13		Administrasi Perseorangan				
			800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			800.1.13.4	Sekretaris Daerah	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		800.1.14		Penilaian Kompetensi				
			800.1.14.1	Penilaian Kompetensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
	800.2			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
		800.2.1		Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		800.2.2		Pendidikan dan Pelatihan				
			800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.2.2.4	Modul-modul diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.2.2.5	Panduan fasilitator	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		800.2.3		Widyaiswara				
			800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		800.2.4		Penyelenggaraan Diklat				
			800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.2.4.2	Penyelenggaraan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.2.4.3	Konsultasi, advokasi sistensi penyelenggaraan diklat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

			800.2.4.5	Sistem informasi diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		800.2.5		Alumni	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
10	900			KEUANGAN				
	900.1			KEUANGAN DAERAH				
		900.1.1		Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)				
			900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
		900.1.2		Penyusunan Anggaran				
			900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		900.1.3		Pelaksanaan Anggaran				
			900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait

			900.1.3.2	Pendapatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			900.1.3.3	Belanja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			900.1.3.4	Pembiayaan Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			900.1.3.7	Daftar Gaji	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			900.1.3.8	Kartu Gaji	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			900.1.3.10	Laporan Keuangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait

		900.1.4		Pinjaman/Hibah Luar Negeri				
			900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			900.1.4.4	Dokumen Loan Agreemeent (PHLN) Antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan lender	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l.: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait

			900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA),	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			900.1.4.10	Staff Appraisal Report	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			900.1.4.11	Report /Laporan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			900.1.4.13	Completion Report/Annual Report	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		900.1.5		Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		900.1.6		Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)				
			900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan /Triwulanan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		900.1.7		Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan				
			900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait

			900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			900.1.7.3	Buku Rekening Bank	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait

			900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
		900.1.8		Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan				
			900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

		900.1.9	<p>Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		900.1.10	<p>Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu</p>				

			900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/ Pergeseran/Revisinya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

		900.1.11		Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah				
			900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait
			900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Kerja Terkait

		900.1.12		Anggaran Daerah				
			900.1.12.1	Anggaran Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Kerja Terkait
			900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		900.1.13		Pendapatan dan Investasi Daerah				
			900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah Antara lain: analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir serta penyertaan modal daerah, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah dan dana bergulir dan penyertaan modal daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		900.1.14		Fasilitasi Dana Perimbangan				
			900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			900.1.14.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
--	--	--	------------	--	----------	--	--	--------------------

			900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			900.1.14.5	Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
		900.1.15		Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah				

			900.1.15.1	Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

			900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli Antara lain: Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggung jawaban keuangan daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait
			900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Kerja Terkait

**BUPATI SAMOSIR**

Cap / dto

**VANDIKO T. GULTOM**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir  
 Nomor 21 Tahun 2025  
 Seri F Nomor 1066  
 Tanggal 24 Mei 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

  
 MARUDUT TUA SITINJAK